



PERUBAHAN SOSIAL

**Dr. Ir. Teguh Kismantoroadji, M.Si.
Ir. Daru Retnowati, M.Si.**



Pertemuan ke-9

**PERSPEKTIF
MODERNISASI
DALAM PERUBAHAN SOSIAL
(01)**



Sejarah Lahirnya

Teori Modernisasi lahir sebagai produk sejarah 3 peristiwa penting setelah masa perang dunia II, yaitu:

1. Munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan di dunia. Sekalipun negara-negara barat, seperti; Inggris, Perancis dan Jerman semakin melemah setelah PD II, Amerika Serikat justru menjadi "pemimpin" dunia setelah pelaksanaan *Marshall Plan* yang diperlukan untuk membangun kembali Eropa Barat akibat PD II. Pada tahun 1950-an AS praktis menjadi pengendali percaturan dunia.



2. Pada saat yang hampir bersamaan terjadi perluasan gerakan komunis di dunia. Uni Soviet mampu memperluas pengaruhnya ke Eropa Timur, Asia (Cina, Vietnam, Korea). Hal ini secara tidak langsung mendorong AS untuk berusaha memperluas pengaruh politiknya dalam upaya membendung pengaruh komunis.



3. Lahirnya negara-negara baru di Asia, Afrika dan Amerika Latin yang sebelumnya merupakan negara jajahan negara-negara Eropa. Negara-negara baru ini secara serempak mencari model-model pembangunan yang akan digunakan sebagai contoh untuk membangun ekonominya dan dalam usaha untuk mempercepat pencapaian kemerdekaan politiknya. Dalam keadaan seperti ini wajar jika AS memberikan bantuan fasilitas dan dorongan agar negara-negara baru ini tidak jatuh ke dalam pengaruh Uni Soviet.



Asumsi Teoretis dan Metodologis

Teori modernisasi asumsinya berasal dari teori evolusi;

Perubahan sosial pada dasarnya merupakan gerakan searah, linier, progresif dan perlahan-lahan, yang membawa masyarakat berubah dari tahapan primitif ke tahapan yang lebih maju, dan membuat berbagai masyarakat memiliki bentuk struktur yang serupa



Berdasarkan asumsi tersebut maka teori modernisasi membangun kerangka teori dan thesisnya dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Modernisasi merupakan proses bertahap. Teori Rostow misalnya membagi masyarakat menjadi masyarakat tradisional, para kondisi untuk *take-off*, *take-off* dengan pertumbuhan ekonomi normal, pertumbuhan ke arah kematangan, dan periode konsumsi massa yang tinggi.



2. Modernisasi juga dapat dikatakan sebagai proses homogenisasi, dengan modernisasi akan terbentuk masyarakat dengan tendensi dan struktur serupa. Levy mengatakan bahwa *“sesuai dengan perkembangan waktu, mereka dan kita akan semakin mirip satu sama lain”*. Hal ini terjadi karena model modernisasi menjanjikan bahwa semakin modern tahapan yang dilalui, semakin serupa bentuk dan karakteristik berbagai masyarakat yang terlibat dalam perubahan sosial.



3. Modernisasi terkadang wemujud dalam bentuk lahirnya sebagai proses Eropanisasi atau Amerikanisasi atau moderniasi sama dengan Westernisasi (barat).
4. Modernisasi juga dilihat sebagai proses yang tidak bergerak mundur, proses modernisasi tidak bisa dihentikan karena ia sudah mulai. Ketika sudah terjadi kontak antara negara dunia ketiga dengan negara barat, negara dunia ketiga tidak mampu untuk menolak upaya modernisasi.



Modernisasi dianggap sebagai jawaban universal persoalan dunia ketiga tanpa memperhatikan ciri-ciri tradisional negara dunia ketiga.

5. Modernisasi merupakan perubahan progresif, Sekalipun akibat samping modernisasi melampaui batas-batas kemanusiaan dan moral universal, dalam jangka panjang modernisasi tidak hanya sekedar merupakan sesuatu yang terjadi, tetapi modernisasi dilihat sebagai sesuatu yang diperlukan dan diinginkan.



6. Modernisasi memerlukan waktu panjang, modernisasi dilihat sebagai proses evolusioner (bukan revolusioner), diperlukan waktu beberapa generasi bahkan berabad-abad untuk sampai tahapan akhir dan hanya waktu dan sejarah yang dapat menyaksikan keseluruhan proses, hasil dan akibat langsung maupun akibat sampingannya.



Satu asumsi lain teori modernisasi berasal dari teori Fungsionalisme. Teori ini memberikan tekanan pada keterkaitan dan ketergantungan lembaga sosial, pentingnya variabel kebakuan dan mengukur dalam sistem budaya dan adanya keseimbangan dinamis-stasioner dari perubahan sosial.



Berdasarkan teori tersebut maka teori modernisasi mengandung asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Modernisasi merupakan proses sistemik. Modernisasi melibatkan perubahan pada segala aspek tingkah laku sosial, termasuk di dalamnya industrialisasi, urbanisasi, diferensiasi, sekularisasi, sentralisasi, dan sebagainya



2. Modernisasi diartikan sebagai proses transformasi. Dalam rangka mencapai status modern, struktur dan nilai-nilai tradisional secara total harus diganti dengan seperangkat struktur dan nilai-nilai modern. Huntington (1976), mengatakan bahwa teori modernisasi melihat modern dan tradisional sebagai konsep yang pada dasarnya bertentangan (asimetris). Oleh karena itu, dalam proses modernisasi apa yang dikatakan tradisional tidak memiliki peran berarti, bahkan dalam banyak hal tidak berguna sama sekali, dan karena itu harus diganti.



3. Modernisasi melibatkan proses terus-menerus (*immanent*), karena modernisasi bersifat sistemik dan transformatif maka proses modernisasi melibatkan perubahan sosial yang terus-menerus dalam sistem sosial. Sekali terjadi perubahan sosial pada satu aspek kehidupan, akan membawa perubahan sosial pada aspek lain. Karena adanya karakteristik imanensi ini, teori modernisasi cenderung memberikan pada faktor dalam (*internal resources*) sebagai sumber perubahan dunia ketiga.



Selain asumsi-asumsi sebagai warisan dari teori Evolusi & Fungsional, teori modernisasi juga memiliki kesamaan metode pengkajian dengan kedua teori tersebut. Teori modernisasi berkecenderungan untuk mengkaji persoalan negara dunia ketiga secara abstrak dan bertendensi mengambil kesimpulan-kesimpulan umum untuk dijadikan model yang dibakukan.



Oleh karena itu teori modernisasi cenderung untuk merumuskan tendensi-tendensi universal dan prospek kelaziman yang hendak berlaku dalam proses pembangunan negara dunia ketiga, dan dengan sendirinya tidak memperhatikan fakta yang khas dan unik dari sejarah masing-masing negara dunia ketiga.



Dalam pengkajian dan perumusan kebijakan untuk dunia ketiga menurut Tipp (1976), teori modernisasi menggunakan batasan wilayah negara sebagai unit analisisnya. Apapun bekal pemahaman teorinya, perubahan setiap konsumen modernisasi dikaji pada tingkat nasional. Dengan katan lain dasarnya teori modernisasi adalah teori transformasi suatu negara, dengan tidak memperhatikan perubahan sosial pada besaran regional dan global.



Kerangka Analisis dan Metode Kajian

Teori modernisasi beranggapan bahwa negara dunia ketiga merupakan negara terbelakang dengan masyarakat tradisionalnya, sementara negara-negara barat dilihat sebagai negara modern. Negara-negara dunia ketiga harus melepaskan ciri-ciri ketradisionalannya dan mengadaptasi apa-apa yang positif dimiliki negara barat, beberapa ilmuan berpendapat:



1. **Mc Clelland**, menyarankan agar negara dunia ketiga mengembangkan dirinya untuk memiliki nilai-nilai kebutuhan berprestasi yang dimiliki barat untuk menumbuhkan dan mengembangkan kaum wiraswastawan modernnya.
2. **Inkeles**, menunjukkan bahwa manusia modern negara dunia ketiga cenderung memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dimiliki manusia modern barat.



3. **Bellah**, berpendapat bahwa nilai-nilai universalitas dan motivasi amat diperlukan oleh negara dunia ketiga untuk membebaskan kungkungan ekonomi tradisonalnya.
4. **Sumawinata**, berpendapat bahwa jika negara dunia ketiga hendak menuju fase lepas landasnya, maka ia perlu memiliki beberapa syarat ekonomis yang pernah dimiliki barat, seperti ketika barat mencapai fase tersebut.



5. **Lipset**, menyarankan bahwa dunia ketiga terlebih dahulu hendaknya mengikuti gaya pembangunan ekonomi barat sebelum mereka mampu mengikuti gaya pembangunan politik demokratis barat.



Perspektif modernisasi berpendapat bahwa asumsi-asumsi dasar dan thesis-thesis teori modernisasi berlaku secara universal dan oleh karena itu dapat diterapkan pada setiap negara dunia ketiga, tanpa memperhatikan keunikan masing-masing negara. Dengan demikian teori modernisasi (klasik) cenderung untuk melakukan analisis yang abstrak, tanpa memperhatikan dimensi sejarah dan wilayah negara yang dimaksud atau tak memiliki batas ruang dan waktu dalam analisisnya.